

Perbatasan, Nelayan Dan Kemiskinan; Konstruk Kemiskinan Pada Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina

Border, fisherman and poverty; the construct of poverty at border of Indonesia and Philippines

Sunandar Macpal*

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Sultan Amai
Gorontalo Indonesia

Diterima: 27 Juni 2020; Direview: 13 Juli 2020; Disetujui: 23 Agustus 2020

Abstrak

Tulisan ini bermaksud menjelaskan bagaimana konstruk kemiskinan yang terjadi pada masyarakat pesisir dan pulau kecil di perbatasan Indonesia-Filipina. Tulisan ini merupakan kajian literature yang menggunakan *social exclusion* sebagai dasar untuk membangun wacana. Kabupaten Sangihe merupakan wilayah pesisir yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia – Filipina. Sebagai wilayah pesisir, banyak masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemiskinan yang terjadi di wilayah Sangihe merupakan akibat struktural (negara) yang menjadikan wilayah Sangihe menjadi perbatasan, selain itu kebijakan untuk memodernkan nelayan sebagai langkah mengurangi kemiskinan justru menghilangkan banyak tradisi lokal termasuk dualitas mata pencaharian. Memoderenkan nelayan juga berdampak pada hilangnya kebudayaan pada tataran pengetahuan dan bahasa.

Kata Kunci: Perbatasan, Kemiskinan, Nelayan, Eksklusi Sosial, Pengetahuan Lokal

Abstract

This paper intends to explain how the construct of poverty occurs in coastal communities and small islands on the Indonesia-Philippines border. This paper is a literature review that uses social exclusion as a basis for building discourse. Sangihe Regency is a coastal area located in Indonesia — the Philippines border region. As a coastal area, many people earn a living as fishermen. Poverty that occurs in the Sangihe region is a structural (state) consequence that makes the Sangihe region become a border. The policy to modernize fishermen as a step to reduce poverty actually eliminates many local traditions, including the duality of livelihoods. In addition, modernizing has also had impact on the loss of culture at the level of knowledge and language.

Keywords: Border, Poverty, Fisherman, Social Exclusion, Local Knowledge

How to Cite: Macpal, S. (2021). Perbatasan, Nelayan dan Kemiskinan; Konstruk Kemiskinan pada Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina. ***Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*** 6 (2): 181-193.

*Corresponding author:

E-mail: sunandarmacpal@gmail.com

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)

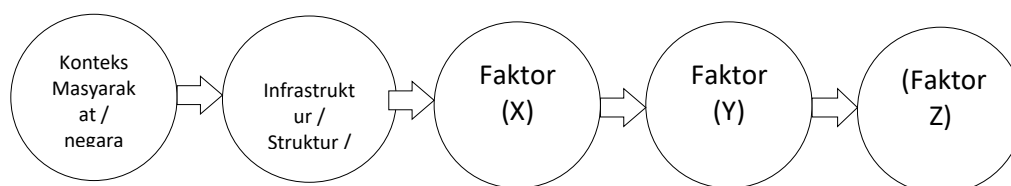
PENDAHULUAN

Juli 2016 saya berkesempatan mengunjungi Kawaluso, sebuah pulau yang terletak di Utara Pulau Sangihe Besar untuk kesekian kalinya. Sebagian besar penduduk di pulau ini bermata pencaharian sebagai nelayan. Pada suatu kesempatan, saya menanyakan tentang keberadaan nelayan-nelayan dari Filipina ketika diberlakukan kebijakan dari Menteri Kelautan untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Dengan bernada sinis, seorang nelayan menjawab “itu cuma di berita kalo ada kapal yang di kase tenggelam, itu di sana (laut lepas) masih banyak puso dari Filipin deng ada kapal besar dari Taiwan” (itu hanya dalam berita kalau ada kapal yang ditenggelamkan, disana (laut lepas) masih banyak puso dari Filipina dan ada kapal besar dari Taiwan). Pernyataan nelayan di atas setidaknya mampu untuk menggambarkan keadaan nelayan di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina.

Permasalahan dengan nelayan asing, ternyata hanya satu dari sekian banyak masalah yang terjadi pada nelayan Sangihe. Arus modernisasi yang melanda dunia saat ini juga berdampak pada mulai tergerusnya tradisi-tradisi nelayan pada masyarakat Sangihe. Satu hal yang paling jelas adalah mulai sulitnya untuk melihat perahu-perahu tradisonal yang masih menggunakan dayung. Bila konteks perubahan pada masyarakat Sangihe di bawah dalam tatanan Indonesia, maka perubahan yang terjadi menurut sastrawan Pramoedya Ananta Toer sebagai arus balik dimana terjadi

kemunduran dalam budaya maritim Nusantara yang meyisahkan cerita bahwa nenek moyang kita orang pelaut (Humaedi dan Solihin: 2015). Selain *illegal fishing* dan arus modernisasi, masalah kemiskinan sangat dekat dengan masyarakat nelayan. Ketika membandingkan masyarakat desa pesisir dengan masyarakat lain, nelayan merupakan lapisan yang paling miskin, dibanding dengan komunitas di luar pesisir (Hamzah, A. et, al. 2008)

Jawaban nelayan atas kebijakan pemerintah, mulai sulitnya menemukan perahu dayung merupakan tanda-tanda yang dapat terlihat secara empirik dari perubahan yang terjadi pada nelayan di Sangihe. Kabupaten Sangihe sebagai wilayah pesisir, menurut Tempo, sebagaimana yang dikutip dari website <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/22/092782246/sangihe-sitaro-talau-d-masuk-5-besar-termiskin-di-sulut>, merupakan salah satu daerah yang masuk dalam lima besar daerah termiskin di Sulawesi Utara. Dalam hal ini, kemiskinan yang terjadi pada masyarakat pesisir dapat dilihat sebagai salah satu dampak dari perubahan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan tafsir, tanda-tanda tersebut kemudian dibaca dan ditafsirkan secara lebih lanjut untuk melihat *something stand behind something else*. Pada suatu kesempatan ketika mengajar tafsir kebudayaan Abdullah (2016) menjelaskan terdapat lima langkah yang harus dilakukan dalam melakukan tafsir atas sebuah fenomena. Langkah-langkah tersebut kemudian saya gunakan dalam tulisan ini. Kelima langkah tersebut seperti dalam bagan berikut:



Gambar 1. Langkah-langkah tafsir kebudayaan
Sumber: Irwan Abdullah dalam kuliah tafsir kebudayaan

Lebih lanjut lagi menurut Abdullah (2016) bahwa proses tafsir dibaca dari kanan ke kiri dimana faktor Z merupakan dampak yang terjadi karena adanya faktor X semakin ke kiri menjadi semakin abstrak. Dalam tulisan ini, kemiskinan kemudian saya jadikan sebagai faktor Z (dampak dari adanya faktor X). faktor Y adalah menghilangnya tradisi dari nelayan di wilayah perbatasan. Sementara faktor X adalah proses modernisasi dari nelayan akibat kebijakan dari negara dan dalam tatanan struktur keberadaan masyarakat Sangihe sebagai wilayah perbatasan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan refleksi dari penulis sebagai peneliti di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina dengan kajian literature yang menggunakan *social exclusion* sebagai dasar untuk membangun wacana. Levitas (2006) memberikan definisi mengenai konsep ini. Menurutnya "*Social exclusion is a complex and multi-dimensional process. It involves the lack or denial of resources, rights, goods and services, and the inability to participate in the normal relationships and activities, available to the majority of people in a society, whether in economic, social, cultural or political arenas. It affects both the quality of life of individuals and the equity and cohesion of society as a whole*".

Akar konsep eksklusi sosial pada masyarakat Eropa tidak bisa dilepaskan dari kemiskinan akibat perkembangan industri. Di mana, tidak sedikit orang pada akhirnya tidak dapat mengakses pekerjaan (Yunita dan Sekarningrum, 2018). Eksklusi sosial sering dihubungkan dengan *underclass* atau dalam bahanya Marx disebut sebagai *lumpenproletariat* yaitu mereka yang secara terus menerus berada dalam kemiskinan yang tidak mampu karena alasan apapun untuk mencari nafkah dalam proses dominan produksi, distribusi maupun pertukaran (Crompton, 1993)

Bagi Gidens (2006), eksklusi sosial merujuk pada sumber yang mengakibatkan ketidaksetaraan. Lebih lanjut, bahwa konsep eksklusi sosial bukan hanya sekedar konsep tentang kemiskinan, walaupun kemiskinan termasuk di dalamnya. Eksklusi sosial selalu merujuk pada berbagai factor yang dapat mencegah individu atau kelompok dari memiliki peluang dari kelompok mayoritas. Lawang (2014) kemudian mengemukakan bahwa struktur sosial, ekonomi dan politik turut berperan dalam memunculkan eksklusi sosial dan *underclass*.

Menurut Lawang (2014) dalam gagasannya tentang eksklusi sosial yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya *underclass*. Kemudian eksklusi sosial yang terjadi di Indonesia bisa menunjuk pada beberapa satuan sosial seperti: fakir miskin, perempuan, orang lanjut usia, orang yang hidup di daerah terpencil, penyandang disabilitas, stigama tertentu seperti komunis, narkoba, HIV/AIDS bahkan yang terbaru Covid-19. Bagi Lawang, orang-orang dalam satuan sosial ini tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik *main-stream*. Lebih lanjut lagi bahwa eksklusi sosial daerah perdesaan sudah bersifat structural, sehingga menjadikan *underclass* sulit untuk keluar dan sebaliknya menjadikan mereka lebih mudah untuk terperosok dan menjadi *underclass*.

Tulisan ini kemudian saya bagi menjadi enam bagian. Pada bagian pertama merupakan pendahuluan dimana pada bagian saya menjelaskan latar belakang dan konsep dalam tulisan ini. Bagian kedua berisi tentang konteks Sangihe sebagai wilayah perbatasan. Selanjutnya pada bagian ketiga berisi gambaran tentang kebijakan-kebijakan negara dalam usaha memodernkan nelayan di wilayah perbatasan khususnya kepulauan Sangihe. Bagian keempat adalah penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang terjadi kepada nelayan di kepulauan Sangihe akibat kebijakan pemerintah

dalam memodernkan nelayan. Sementara pada bagian kelima berisi tentang dampak-dampak yang lebih lanjut mengenai proses modernisasi dan kebijakan pemerintah untuk nelayan di wilayah perbatasan. Bagian terakhir dalam tulisan ini adalah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nusa Utara, Menjadi Batas

Kepulauan Sangihe dan Talaud tercatat dalam Negarakertagama dikenal dengan Uda, dan menjadi salah satu wilayah dari kerajaan Majapahit yang wajib membayar pajak, sebagaimana penuturan Lombard (2008).

“Keterangan yang sepintas saja itu untuk sebagian dibenarkan oleh apa yang dikatakan dalam Nagarakertagama tentang organisasi-organisasi perdagangan antara Jawa dan “negeri-negeri wajib pajak”. Dalam pupuh 13 dan 14 diperinci tidak kurang dari 98 nama tempat yang dikatakan bergantung pada Mojopahit dan kalau ditempatkan di peta meliputi kurang lebih keseluruhan wilayah Indonesia sekarang”

Wilayah-wilayah yang disebut dalam Negarakertagama tersebut merupakan kantor-kantor dagang yang tidak langsung di urus oleh pegawai-pegawai Majapahit. Namun, diserahkan kepada para pemuka agama yang bertindak sebagai pegawai, dimana pada setiap musim (*anken pratimasa*) mereka memungut upeti secara tetap (Lombard, 2008). Selain itu, kawasan ini juga dikenal dengan nama Shao San. Dalam bukunya yang berjudul Ying-yai Sheng-Lan, Ma Huan yang mengikuti ekspedisi Cheng Ho mencantumkan adanya pulau bernama Shao-Shan. Pulau ini berada di gugusan kepulauan antara Su-Lu dan Chih lo-li. Sementara sebutan Sanghir atau Sanguin tampaknya digunakan oleh pelaut Eropa (Spanyol dan Portugis) berdasarkan keterangan dari pelaut Melayu yang sudah melayari rute pelayaran di kepulauan ini (Ulaen, 2003)

Kepulauan ini oleh Brown diberi nama *archipelago of tears* artinya kepulauan air mata. Menurut Kaunang (2013) hal ini terkait dengan onomastik Sangihe secara etimologis yang berasal dari kata sangi, Menurut Kaunang kata sangi berasal dari legenda bencana alam di masa lampau yang mengakibatkan tenggelamnya beberapa pulau yang menghubungkan Kepulauan Sangihe dan Talaud dengan gugusan pulau-pulau di Filipina Selatan. Kemudian, pada masa lampau, daerah ini juga dijadikan sebagai salah satu lokasi jarahan perompak, bajak laut Sulu-Mindanao, Filipina. Mereka datang dan pergi dengan tiba-tiba, mengambil harta benda dan wanita sehingga yang tertinggal hanyalah tangisan dan air mata (Kaunang, 2013)

Kawasan Sangihe, sebelumnya juga dikenal dengan nama Nusa Utara, Merupakan perlintasan niaga penting karena posisinya yang strategis. Secara geografis Kepulauan Sangihe terletak antara 4° 4'13" - 4° 44'22" Lintang Utara, 125° 9'28" - 125° 56'57" Bujur Timur, berada antara Pulau Sulawesi dan Mindanao Filipina Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Kepulauan Talaud dan laut Mindanao Filipina Selatan, sebelah selatan dengan Kepulauan Siau, sebelah timur dengan Samudera Pasifik dan sebelah barat dengan Laut Sulawesi. Selain itu Nusa Utara juga sebagai daerah yang berada di tengah jalur perdagangan rempah dari Cina, Filipina, Sulu menuju Maluku Utara maupun dari Malaya dan Borneo ke Maluku Utara menuju Ternate yang menjadi pusat perdagangan rempah pada abad 16-17 (Kaunang, 1999). Jalur yang sama juga yang digunakan oleh pelayaran-pelayaran bangsa Eropa yakni Portugis dan Spanyol menuju kawasan kaya rempah di Halmahera.

Kapal Eropa pertama kali berlayar di perairan kawasan ini, menggunakan mualim setempat untuk mengantarkan ke tempat tujuan. Dalam ekspedisi Magelhães (1521), d'Elcano menculik dua perahu

pandu laut setempat untuk mengantarkan kapal-kapalnya dari Filipina ke Tidore (Pigafetta, 1801 dalam Lopian, 2008). Orang-orang Spanyol sebenarnya lebih memusatkan perhatiannya pada Filipina serta perdagangan sutra dan porselin dengan Cina. Akan tetapi, perhatian mereka pada cengkeh dan pala telah membawa mereka sampai ke Maluku Utara (Lopian, 2008).

Kekuasaan Belanda dalam menguasai jalan perdagangan dari Malaka ke Maluku pada abad ke 17 membuat akses orang pribumi menjadi semakin sulit untuk memelihara hubungan laut antar pelabuhan. Tidak hanya orang-orang pribumi, orang Portugis pun ikut berusaha mencari jalan lain dari Malaka ke Maluku yakni lebih ke utara dengan mengikuti pantai Kalimantan Utara dan menyeberang Laut Sulawesi. Rute ini memang sudah dipakai pelaut-pelaut pribumi sebab antara Filipina Selatan (Mindanao dan Sulu) dengan Brunei telah ada hubungan langsung, demikian pula antara Brunei dengan negeri-negeri di Selat Malaka. Di sisi lain, hubungan antara Filipina dan Maluku Utara telah lama di kenal juga. Melalui jalur Brunei dan Mindanao, kapal-kapal tiba di Maluku daerah yang menjadi incaran kapal-kapal asing karena menghasilkan pala dan cengkeh (Lopian, 2008)

Menurut Ulaen (2003) ada dua jalur pelayaran yang menjadikan kepulauan Sangihe dan Talaud sebagai lintasan niaga. Pertama, jalur pelayaran dari daratan Cina melalui Filipina dan Sulu menuju pulau rempah-rempah (Maluku Utara) sejak abad ke 15. Kedua, jalur pelayaran pelaut dan pedagang Melayu dari Malaka melewati Borneo Utara ke kepulauan Sulu dan laut Sulawesi menuju Maluku Utara. Kedua jalur perdagangan ini kemudian digunakan oleh para pelaut Eropa dengan menggunakan pemandu setempat. Sebenarnya kedua jalur pelayaran tersebut adalah jalur pelayaran yang sudah dilayari oleh penduduk setempat. Dengan alat

transportasi laut yang terbilang sederhana, mereka melakukan kegiatan barter atau tukar menukar bahan makanan. Penduduk pulau-pulau kecil yang menggantungkan hidupnya dari laut membawa hasil tangkapan mereka ke penduduk pulau-pulau yang agak besar dan menukarkannya dengan hasil ladang dan kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak diperoleh di pulau-pulau kecil. Meskipun dalam skala kecil, daerah ini juga menjadi bagian dari kawasan niaga yang berkembang baik di daratan Mindanao, pulau-pulau Sulu dan Maluku Utara. Pelabuhan-pelabuhan kecil di Pulau Sangihe Besar yang semula kurang mendapat perhatian berkembang menjadi tempat persinggahan dan perniagaan (Ulaen, 2003)

Lopian (2009) menyatakan kawasan Laut Sulawesi merupakan kesatuan wilayah utuh, memiliki pertumbuhan sejarah sangat lama dan melibatkan penduduk di sekelilingnya yang saat ini terbagi dalam negara; Indonesia, Malaysia dan Filipina. Velasco (2010) menyebut kawasan Nusa Utara sebagai "the island in between", penduduknya berkerabat dan secara rutin saling mengunjungi untuk alasan kekerabatan maupun perdagangan. Dari sisi bahasa, seluruh kawasan Laut Sulawesi termasuk dalam rumpun Austronesia. Bahasa Sangihe sendiri memiliki kedekatan dengan bahasa Ilanun, Marano dan Mangindanau di Filipina Selatan (Lopian, 2009)

Kesatuan dunia bahari di sini kemudian mulai retak dengan kedatangan orang asing (*bayanga*) dari Eropa Barat. Mula-mula orang Portugis dan Spanyol (abad ke-16) kemudian orang Belanda (abad ke-17). Perang antara Spanyol dan Belanda yang berawal di Eropa sesungguhnya merupakan perang kemerdekaan Bangsa Belanda dan telah berlangsung puluhan tahun lamanya, dilanjutkan di wilayah Timur Nusantara, termasuk wilayah Laut Sulawesi. Perang ini akhirnya diselesaikan pada perjanjian

perdamaian Munster pada tahun 1648 ketika Spanyol mengakui Republik Persatuan Belanda sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Perjanjian damai ini turut menentukan batas-batas wilayahnya di seberang lautan, termasuk wilayah Laut Sulawesi. Bagian utara menjadi wilayah dibawah pengaruh Spanyol dengan pusatnya di Manila, sedangkan bagian selatan masuk wilayah Belanda yang berpusat di Ternate. Pembagian wilayah ini mengakibatkan penduduknya terpisah dan kini masuk dalam dua negara-bangsa yang berbeda (Lapian dalam Ulaen: 2003).

Catatan di atas menunjukkan bahwa sejak dahulu kawasan Nusa Utara telah menjadi perlintasan niaga bagi bangsa lain, sehingga cukup aneh bila saat ini justru terasing dari perbincangan di negeri sendiri. Sangihe yang pada awalnya merupakan daratan utama bagi kepulauan sekitarnya dan titik penting perdagangan menjadi wilayah pinggiran. Oleh karena Manado kini yang menjadi daratan utama. Sedangkan Sangihe, hanyalah salah satu pulau di perbatasan. Kondisi ini diperburuk saat Indonesia menjadi negara merdeka. Kebijakan pembangunan yang berorientasi di Jawa menyebabkan perdagangan di wilayah ini tidak berkembang, tidak ada lagi jalur niaga antar pulau melewati kepulauan ini, akhirnya secara bertahap daerah ini terlupakan.

Niat Baik yang Salah

Modernisasi pada hakikatnya merupakan proses perubahan atau pembaharuan. Pembaharuan mencakup bidang-bidang yang sangat banyak. Bidang mana yang akan diutamakan oleh suatu masyarakat tergantung dari kebijaksanaan penguasa yang memimpin masyarakat tersebut (Rosana, 2011). Tujuan utama dari modernisasi adalah untuk membawa masyarakat menuju perubahan ke arah yang lebih maju. Pada intinya, modernisasi tergantung pada perubahan yang terjadi di

masyarakat itu sendiri (<https://s2ppuns12.wordpress.com/2012/01/03/modernisasi-perikanan-terhadap-stratifikasi-masyarakat-pesisir-suku-bajo/>). Kehidupan nelayan yang masih menggantungkan nasib kepada hasil laut, masih dalam taraf sederhana dengan pola mata pencaharian menggunakan teknologi tradisional. Di samping alat tangkap mereka sudah jauh tertinggal, mereka melaut juga pada area penangkapan yang terbatas di wilayah pesisir. Rendahnya daya jelajah nelayan ini, dianggap membuat nelayan semakin sulit dalam memperbaiki kualitas hidupnya. Anggapan seperti ini kemudian melahirkan proses modernisasi terhadap komunitas nelayan.

Modernisasi melalui peningkatan dan penggunaan teknologi alat tangkap serta bantuan permodalan berimplikasi pada kegiatan serta organisasi pengangkapan ikan dan pada akhirnya terjadi perubahan dalam suatu komunitas. Program motorisasi perahu dan modernisasi perikanan tangkap pada tahun 1980-an yang dikenal dengan Revolusi Biru (Hamzah, 2008). Kaitannya dengan modernisasi nelayan, harian Kompas selama satu minggu (10-15 Oktober 2011) telah menurunkan berita tentang persoalan yang lebih serius tentang bantuan kapal untuk nelayan sebagai bagian dari desain modernisasi nelayan. Ada rencana 1.000 kapal untuk nelayan hingga 2014. Namun, hingga saat ini baru terealisasi 46 kapal dari 60 kapal yang ditargetkan tahun 2010. Adapun target tahun 2011 adalah 253 kapal. (<http://health.kompas.com/read/2011/11/01/02074380/modernisasi.nelayan>).

Niat baik pemerintah untuk membantu nelayan dengan usaha modernisasi nelayan juga terjadi pada masyarakat Sangihe. Modernisasi nelayan yang terjadi mengakibatkan masyarakat Sangihe yang dahulunya masih menggunakan perahu dayung perlahan berubah dan mulai menggunakan perahu dengan mesin. Namun proses moderinasi

ini ternyata tidak hanya berdampak baik pada masyarakat Sangihe. Proses modernisasi ini banyak menghilangkan tradisi-tradisi nelayan dalam tataran pengetahuan lokal. Dalam akses terhadap sumber daya, modernisasi ini juga ternyata memiskinkan nelayan.

Persoalan lain yang menderu nelayan di kepulauan Sangihe adalah banyaknya ponton yang bertebaran di wilayah perarian Sangihe. Ponton atau rumah ikan tersebut dibuat agar ikan-ikan mendekat dan tinggal di sekitar wilayah Ponton. Ponton biasanya dilepas pada jarak lebih dari tiga mil laut dari daratan. Banyaknya ponton kemudian mengakibatkan ikan-ikan sudah tidak lagi mendekat ke daratan. Jauhnya *ponton* dari daratan mengakibatkan nelayan-nelayan lokal dengan perahu dayung tidak dapat menangkap ikan. Permasalahan lain adalah *ponton-ponton* biasanya dimiliki oleh mereka yang bermodal besar dan juga memiliki kapal tangkap yang sudah sangat modern. *Ponton* biasanya ditunggu/atau dijaga oleh satu orang yang disewa oleh pemilik *ponton* tersebut. Penjaga *ponton* tersebut memberi info kepada pemilik *ponton* apabila ada peningkatan jumlah ikan di sekitar wilayah *ponton*. Saat mengetahui ada peningkatan jumlah ikan, maka pemilik *ponton* langsung mengarahkan kapal tangkap ikan miliknya untuk menjaring ikan di wilayah *ponton* tersebut. Pada saat yang sama, nelayan-nelayan yang mencari ikan di sekitar wilayah tersebut harus segera pindah karena bisa mengganggu dalam proses penangkapan ikan tersebut.

Laut tidak Seramah dulu lagi

Masyarakat Sangihe pada umumnya tidak mengenal konsep mata pencaharian tunggal, walaupun kadang mereka harus mencantumkan salah satu jenis mata pencaharian untuk keperluan data. Kenyataan di lapangan, masyarakat Sangihe justru menjadikan laut sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup

dalam artian lain, menjadi nelayan adalah mata pencaharian yang lain disamping mata pencaharian yang tertulis di dalam data. Banyak diantara masyarakat Sangihe saat pagi hari ke kebun untuk bertani, pada sore atau malam hari pergi ke laut untuk mencari ikan walau sekedar untuk dijadikan sebagai konsumsi pribadi dalam keluarga. Kaitanya dengan konsep dualisme mata pencaharian, masyarakat Sangihe memiliki pengetahuan untuk waktu-waktu panen besar hasil pertanian dan hasil laut. Pengetahuan ini didasarkan pada hitungan kalender Sangihe. Dalam pengetahuan ini, masyarakat Sangihe percaya pada bulan *Paghulu*, pintu keberkahan pada pertanian sedang dibuka, karena biasanya pada bulan tersebut, terjadi panen besar hasil tanaman seperti Kopra, Pala dan Cengkih. Saat bulan *Paghulu* telah selesai, maka pada saat yang sama masyarakat Sangihe percaya bahwa keberkahan di laut tengah dibuka sebagai pengganti mata pencaharian mereka.

Moderinisasi perahu nelayan dari perahu dayung berdampak pada mulai menghilanya dualisme mata pencaharian. Hal ini dikarenakan untuk membuat pambut (*pump-boat*), membutuhkan biaya yang cukup besar. Dimana dalam setiap pembuatan satu perahu membutuhkan biaya yang tidak kurang dari Rp. 5.000.000. Bagi masyarakat yang tidak memiliki modal, mereka terpaksa harus rela kehilangan sumber pencaharian dari laut. Kalaupun mereka tetap melaut, nelayan yang masih menggunakan perahu dayung harus mendayung lebih jauh ke tengah laut. Seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa *ponton-ponton* yang banyak bertebaran di perairan Sangihe mengakibatkan ikan-ikan sudah tidak lagi mendekat ke arah daratan. Hal ini tentu membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Kalau dahulu untuk memenuhi konsumsi pribadi, masyarakat tinggal ambil dayung dan melepas kail, sekarang harus mengeluarkan uang untuk membeli ikan. Dalam hal ini terjadi

perpanjangan mata-rantai distribusi dari konsumsi masyarakat. Perpanjangan rantai distribusi ini jelas menambah beban bagi masyarakat. Menurut Laksono (2004) dalam Topatimasang (2004), hampir dalam semua kasus beban perantara ini selalu lebih berat dipikul oleh mereka yang lemah, para warga tempatan, karena perantara itu cenderung memihak kepada yang kuat dan menguntungkan diri mereka sendiri.

Bagi mereka yang tidak bisa melaut lagi karena keterbatasan sumber daya, harus memutar otak untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Tanaman seperti Kelapa, Pala dan Cengkih, yang hanya bisa dipanen di atas empat bulan tentu tidak bisa diharapkan. Di sisi lain, harga komoditas tersebut sangat ditentukan oleh mekanisme pasar. Saat musim panen besar, harga-harga komoditas tersebut biasanya rendah karena stok yang banyak tersedia. Bagi mereka yang mampu untuk membuat perahu pambut masih bisa tetap mempertahankan dualisme mata pencaharian. Adanya perahu bermotor tidak serta-merta menghilangkan permasalahan bagi nelayan. Sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak, menjadi salah satu faktor yang sering dikeluhkan oleh nelayan. Untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, para nelayan harus mengantri di pom bensin yang berada di Tahuna. Selain itu, untuk mendapatkan pelayanan dari pom bensin, para nelayan setiap hendak membeli bahan bakar harus membawa surat keterangan dari pemerintah Kampung/Desa. Dengan kata lain, sebelum nelayan melaut mereka harus melewati sistem yang rumit dimana harus pergi ke kantor Kapitalaung setelah itu juga harus mengantri untuk mendapatkan jatah bahan bakar. Membeli di eceran dengan harga yang lebih tinggi kemudian menjadi pilihan terakhir oleh nelayan.

Kusumastanto (2002) mencatat di Indonesia terdapat 42 kota dan 181

kabupaten terletak di kawasan pesisir. Sumber daya ikan sebagai bahan konsumsi 90% berasal dari wilayah pesisir. Sementara Syam dalam Suhartini, et. al. (2005) memperkirakan luas wilayah maritim Indonesia mencapai 5,8 juta Km² dan dapat menjadi potensi sumber daya kelautan ataupun tumpuan harapan masa depan (Hamzah et, al. 2008). Data di atas memberikan gambaran akan kayanya wilayah perairan Indonesia. Kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia ternyata sangat menarik perhatian dari para nelayan negeri tetangga. Banyaknya nelayan dari Filipina yang datang untuk mencari ikan di wilayah perairan Sangihe mengakibatkan nelayan Sangihe di lautan lepas harus bersaing dengan perahu pusu dari Mindanao. Terkadang nelayan Mindanao membawa senjata api dan merampas tangkapan nelayan setempat, sementara perlindungan dari aparat keamanan Indonesia sangat minim. Lapien, dalam tulisannya "Orang laut, Bajak laut, Raja Laut; Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX" (2009) mengatakan sepanjang sejarah penduduk kawasan Sangir-Talud memang sering menjadi korban perompak dari daerah Lanao dan Balangingi di Mindanao. Hal ini masih menimbulkan sikap traumatik hingga sekarang. Selain itu dari penelitian lapangan diketahui bahwa pada tahun 2002, dua orang nelayan Sangir asal Nusa Tabukan tewas ditembak perompak Filipina di dekat Pulau Matutuang dan dirampok sirip hiu hasil tangkapannya (Widianto, 2012)

Hadirnya nelayan-nelayan dari Filipina, banyaknya Ponton yang bertebaran diperairan Sangihe dapat dikatakan telah terjadi perebutan ruang (laut). Kaitannya dengan perebutan ruang, Prins dan Nas (1983) mengemukakan bahwa semua kegiatan manusia harus menggunakan ruang. Hubungan sosial dibangun di atas landasan struktur ruang (*spatial structure*), dan hubungan-hubungan ini, demikian juga struktur ruang, selalu dilanda ketegangan. Semakin

banyak individu atau kelompok ingin mengkases ruang yang sama, maka semakin tinggi ketegangan yang melanda kawasan ruang tersebut (Prins and Nas, 1983). Jika laut diasumsikan sebagai ruang yang paling banyak diminati oleh manusia maka sangat mungkin melahirkan ketegangan-ketegangan antara para nelayan baik sesama nelayan lokal maupun dengan nelayan dari Filipina.

Permasalahan-permasalahan seperti ini banyak terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia. Niat baik pembangunan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat justru harus menjadi bumerang sebagai penghasil kemiskinan bagi mereka yang tidak mampu bertahan. Hal ini hal ini sebagaimana disampaikan sebagai hasil dalam loka karya suku-suku asli yang diselenggarakan oleh United Nations University di dataran tinggi Cameron Malaysia. Dalam loka karya tersebut, mengidentifikasi masalah-masalah yang menimpa suku-suku asli adalah pemindahan, pemiskinan budaya dan sosial akibat disitegrasi akibat tuntutan dari luar atas sumber daya alam di sekitarnya. Dalam hal ini penetrasi modal yang mengeksploitasi ke dalam perekonomian suku asli sering kali justru dilakukan oleh negara dengan alasan ingin memajukan suku asli melalui program-program sosial yang terarah (Ghee dan Gomes, 1993-dalam Topatimasang: 2004).

Kaitanya dengan persoalan yang disampaikan oleh Ghee dan Gomes (2003) di atas, telah terjadi juga pemindahan terhadap masyarakat Sangihe. Pemindahan dalam hal ini bukanlah pemindahan pemukiman dari masyarakat Sangihe, namun lebih kepada pemindahan sumber mata pencaharian yang dahulunya bergantung pada dua sumber mata pencaharian yaitu darat dan laut, harus terhenti menjadi satu sumber mata pencaharian. Ketika tradisi melaut yang banyak menyimpan kekayaan tradisi lokal bergeser menjadi lebih modern, terjadi

pemiskinan budaya. Pemiskinan budaya yang terjadi pada masyarakat Sangihe bisa dikata bukanlah keinginan masyarakat Sangihe. Karena pada dasarnya kekuatan modal/kapital untuk mendapatkan akses sumber daya alam berupa hasil laut, memaksa masyarakat Sangihe harus meninggalkan tradisi melaut dengan dayung sebagai bentuk adaptasi untuk bersaing mendapatkan akses sumber daya.

Negara—yang harusnya memiliki tanggung jawab untuk dapat melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (*bonumpublicum, common good, common wealth*)—di dalam relasi dengan kekuatan kapital, posisinya tak lebih sebagai alat yang digunakan oleh para kapitalis untuk melegitimasi aksi predatori dan penipuan yang dijalkannya. Marx pun jauh-jauh hari telah mengungkapkan bahwa di bawah sistem kapitalisme, negara tak ubahnya menjadi sekadar kaki tangan para borjuis (para kaum pemilik modal). Di dalam relasi kapitalisme kontemporer sekarang ini, negara memang sangat diperlukan oleh para kapitalis untuk dapat memberantas berbagai penghalang di dalam membuka ruang-ruang baru melalui kekuatan monopoli atas kekerasan dan aturan hukum yang dimiliki oleh negara (Novianto dalam harian indoprogress.com)

Pengabaian masyarakat miskin dalam kajian sejarah tidak terlepas dari lemahnya relasi kelompok masyarakat ini dengan negara. Secara teoritik negara sebagai kekuatan dominan adalah pengendali sejarah. Kesatuan historis kelas-kelas penguasa diralisasikan dalam negara, dan sejarah mereka secara esensial merupakan sejarah negara. Dalam konteks inilah praktek-praktek pengabaian terhadap sejarah orang miskin yang dalam bahasa Gramsci disebut sebagai kelas-kelas subaltern (tersisihkan, terpinggirkan) berlangsung (Basundoro, 2011). Menurut Antonio Gramsci yang disebut sebagai subaltern adalah kelompok masyarakat

yang tidak bergabung dan tidak dapat bersatu dengan negara sampai mereka mampu menjadi sebuah “Negara”. Mereka adalah kelompok masyarakat yang diabaikan oleh negara karena posisi mereka yang lemah secara sosial, politik dan ekonomi (Gramsci, 2000)

Perebutan ruang bisa dipahami sebagai perebutan alat-alat produksi antara kaum borjuis dengan kaum proletar, jika dilihat dalam konteks teori marxis. Menurut Marx, hubungan-hubungan sosial terikat rapat kepada kekuatan-kekuatan produksi. Melalui kekuatan produksi yang baru, manusia mengubah cara produksinya, cara di mana mereka menunjang hidupnya. Pemilikan pribadi atas alat-alat produksi adalah alat utama dari pembagian masyarakat ke dalam kelas. Setiap masyarakat yang diorganisir atas dasar ini menghasilkan dua kelas yang berada dalam konflik satu sama lain. Kepemilikan alat produksi tidak dipahami sebagai sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang dinamis yang terus mengalami perubahan. Dalam hal ini Marx membedakan kepemilikan alat produksi pada masyarakat kuno, tuan dan serf pada masyarakat feodal, para borjuis dan pabrik-pabrik dengan kaum proletarian dalam masyarakat kapitalis (Duverger, 1981). Kepemilikan alat produksi tersebut senantiasa menjadi ajang perebutan antara kaum borjuis dengan kaum proletar. Kaum borjuis terus-menerus melakukan penguatan untuk mempertahankan alat produksi sedangkan kaum proletar melakukan upaya untuk merebutnya (Duverger, 1981). Selama kurang lebih dua ratus tahun, masyarakat industri kapitalis telah berkembang melalui berbagai aksi penjarahan dan penghancuran terhadap sumber daya alam yang ada di bumi ini. Imperialisme—yang dalam pengertian Lenin merupakan tahap tertinggi dari Kapitalisme—telah berhasil menciptakan jalan bagi kapitalisme ke seluruh penjuru dunia (Tornquist, 2011).

Hilangnya Tradisi Nelayan Lokal

Hadirnya modernisasi terhadap nelayan yang terjadi di Kepulauan Sangihe berdampak pada hilangnya unsur-unsur kebudayaan baik pada tatanan pengetahuan sampai kepada warisan benda budaya. Salah satu hal yang paling nampak adalah dimana sudah tidak bisa lagi ditemukan perahu londe atau Binita. Bininta adalah perahu Jaman Dahulu yang dipakai oleh masyarakat pribumi dalam segala kepentingannya. Sebagai alat transportasi antar pulau, sebagai perahu perang yang sangat ulet sebab antara haluan dan buritan sama. Perahu Bininta mempunyai atribut yang mendasar seperti Ular Naga yang terpasang pada bagian depan, belakang dan tengah, Naga mengandung latar belakang religius bagi leluhur. Bininta adalah Lambang Persatuan, Bininta adalah lambang Kemakmuran dan Bininta adalah Lambang Pertahanan (www.sangihetekab.go.id). Perahu Bininta memiliki arti penting bagi masyarakat Sangihe, sehingga dimasukkan menjadi salah satu unsur dalam lambang daerah.

Perubahan perahu dengan menggunakan mesin juga berdampak pada hilangnya warisan budaya dalam bentuk pengetahuan untuk membuat perahu Bininta. Memang tidak bisa dipungkiri masyarakat Sangihe kemudian mendapatkan pengetahuan baru dalam membuat perahu *pambut*, namun sekali lagi, peran pasar sangat dominan dalam hal ini. Dalam proses pembuatan perahu *Bininta* bahan dasar yang dibutuhkan tersedia dari hutan. Sementara dalam pembuatan perahu *pambut* semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat perahu harus membeli terlebih dahulu. Mulai dari multiplex, paku, tali, cat, sampai perlengkapan lain untuk instalasi mesin.

Tradisi melaut dengan menggunakan perahu dayung memungkinkan masyarakat untuk melantunkan syair-syair. Saat melaut, masyarakat sangihe

bisanya melantunkan syair-syair yang dikenal dengan sasambo. Selain sasambo, masyarakat Sangihe mengenal sistem perhitungan bulan di langit untuk menentukan kapan waktu yang baik untuk melaut atau menanam. Setiap hari (dalam bulan di langit) mempunyai tanda-tanda alam yang berbeda baik kuat arus, arah angin maupun jenis ikan. Hal ini memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah memilih alat pancing nantinya akan digunakan. Kehadiran perahu dengan mesin, juga berdampak pada mulai hilangnya pengetahuan-pengetahuan tentang tanda-tanda alam berdasarkan hitungan bulan di langit. Jika hal ini terus berlangsung maka, apa yang dituliskan oleh Widiyanto (2012) tentang bahasa *Sasahara* yang terancam hilang akan benar-benar terjadi. Hilangnya *Sasahara* juga turut menghilangkan salah satu unsur kebudayaan Sangihe, dimana menurut Koentjaraningrat (2009) bahasa merupakan salah satu dari delapan unsur kebudayaan. Hilangnya bahasa *sasahara* ini tentu juga akan menghilangkan pengetahuan yang memang hanya diwarisi dalam bahasa *sasahara*.

Hadirnya perahu dengan mesin juga turut menghilangkan salah satu tradisi masyarakat yang dikenal dengan mengundangu wanua. Dalam tradisi mengundangu wanua salah satu pantangannya adalah tidak mendaratkan perahu dengan haluan terlebih dahulu. Saat perahu dayung berganti dengan perahu mesin, maka untuk mendaratkan perahu dengan buritan terlebih dahulu menjadi hal yang tidak mungkin. Karena akan berakibat pada patah atau rusaknya proppeler perahu. Hilangnya tradisi *mengundangu wanua* juga turut mempengaruhi sistem pendidikan di masyarakat. Tradisi-tradisi seperti menurut Macpal (2013) digunakan oleh masyarakat Islam sebagai kelompok minoritas untuk mewariskan nilai-nilai Islami kepada generasi berikutnya. Dalam hal ini masyarakat Sangihe memiliki

kesadaran untuk meletakkan kebudayaan sebagai dasar pendidikan. Menurut Laksono (2015) kebudayaan yang diletakkan sebagai dasar pendidikan harus diwacanakan lewat kesenian, olah raga, sastra, budi-pekerti, ritual-ritual nasional dan keagamaan (Laksono: 2015). Lebih lanjut lagi bahwa semesta pendidikan bukan hanya melulu perkara sekolah namun justeru melibatkan urusan sehari-hari (Laksono, 2015).

Perubahan yang terjadi pada masyarakat di Sangihe juga dapat dilihat sebagai konteks perubahan global. Hal ini menurut Abdullah (2010) suatu perubahan global yang terjadi memiliki pengaruh dalam penataan hingga ke tingkat yang paling kecil. Hal ini juga disebabkan oleh globalisasi yang membutuhkan respons yang tepat karena ia memaksa adanya suatu strategi yang tepat (Featherstone: 1991; Hannerz 1996). Proses ini telah membawa pasar menjadi kekuatan dominan dalam pembentukan nilai dan tatanan sosial yang bertumpu pada prinsip-prinsip komunikasi yang padat dan canggih. Pasar telah pula memperluas orientasi masyarakat dan mobilitas sehingga batas-batas sosial budaya selain meluas juga cenderung mengabur akibat berubahnya orientasi ruang masyarakat (Appadurai, 1994 dalam Abdullah, 2010). Sejalan dengan perubahan ini maka karakter homogen suatu komunitas yang tampak dari apa yang dikatakan Geertz (1973) sebagai *shared value* dalam komunitas mengalami persoalan penting. Homogenitas dalam pengetahuan publik dalam tataaran nilai dan praktik sosial merupakan mitos dalam mengidentifikasi keberadaan komunitas.

SIMPULAN

Kepulauan Sangihe pernah mengalami kejayaan maritim sejak awal abad ke 15 dimana wilayah ini menjadi daerah perlintasan niaga yang dilalui kapal-kapal niaga mencapai wilayah

kepulauan Sulu. Kejayaan maritim wilayah kepulauan Sangihe kemudian mulai retak saat Spanyol mengakui kedaulatan wilayah Belanda. Pengakuan kedaulatan Belanda ini berdampak wilayah Sangihe menjadi bagian dari wilayah Belanda yang berpusat di Manado sementara wilayah Filipina selatan menjadi bagian Spanyol yang berpusat di Manila. Sangihe yang pada awalnya merupakan daratan utama bagi kepulauan sekitarnya dan titik penting perdagangan menjadi wilayah pinggiran, karena Manado kini yang menjadi daratan utama. Sedangkan Sangihe, hanyalah salah satu pulau di perbatasan. Kondisi ini diperburuk saat Indonesia menjadi negara merdeka. Kebijakan pembangunan yang berorientasi di Jawa menyebabkan perdagangan di wilayah ini tidak berkembang, tidak ada lagi jalur niaga antar pulau melewati kepulauan ini, akhirnya, secara bertahap daerah ini terlupakan.

Menjadi daerah yang dilupakan menjadikan Negara seakan tidak hadir untuk menjaga wilayah-wilayah negara yang menjadi perbatasan. Lemahnya peran negara dalam mengawasi wilayah perbatasan menjadi masalah bagi nelayan-nelayan lokal. Para nelayan harus berjuang di lautan lepas dan berhadapan langsung dengan nelayan-nelayan dari Filipina yang jelas memiliki perahu dan alat tangkap yang lebih modern dibandingkan dengan nelayan lokal. Kebijakan pemerintah untuk menenggalamkan kapal yang melakukan *illegal fishing* nampaknya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat di kepulauan Sangihe. Kebijakan pemerintah dalam memodernkan nelayan melalui Revolusi Biru ternyata berdampak buruk bagi dunia maritim di Sangihe. Pemodernan perahu dengan menggunakan mesin serta merta menghilangkan kemiskinan yang menjadi masalah bagi nelayan. Hal ini justru semakin memiskinkan nelayan. Hadirnya perahu mesin menjadikan sebagian besar masyarakat sangihe tidak lagi mempunyai dualisme mata pencaharian. Nelayan

kemudian lebih menggantungkan hidupnya pada mekanisme pasar dimana mereka harus membeli bahan-bahan untuk membuat perahu, dan membeli bahan bakar minyak. Niat baik yang salah dari pemerintah untuk memodernkan nelayan ternyata berdampak pada menghilangnya tradisi-tradisi nelayan yang dikhawatirkan akan menghilangkan salah satu unsur kebudayaan yaitu bahasa *Sasahara*. Menghilangnya bahasa sasahara ini juga akan turun menghilangkan kebudayaan sangihe lain yang hanya diwarisi maupaun dilakukan dengan menggunakan *sasahara*.

DAFTAR PUSTAKA

- Irwan, A. (2010), *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basundoro, P, (2011). *Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang Kota di Surabaya 1900 - 1960 an [disertasi]* Yogyakarta: UGM
- Brilman, D., (1986). *Onze Zendingevelden: De Zending op de Sangi-en Talaud-Eilanden diterjemahkan, Wilayah-wilayah Zending Kita: Zending di Kepulauan Sangi dan Talaud, Tahuna: Badan Pekerja Sinode, Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud*
- Crompton, R, (1993), *Class and Stratification, an Introduction to current Debates*, Cambridge UK: Polity Press
- Duverger, M, (1981). *Sosiologi Politik* Jakarta: Rajawali
- Featherstone, M. (1990). *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity*, London: Sage Publication
- Giddens, A. (2006). *Sociology 5th Edition*. UK: Polity Press
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Culture, Selected Essay*, New York; Basic Books Inc Publisher
- Gramschi, A, (2000), *Sejarah dan Budaya*, Surabaya: Pustaka Prometheus
- Hamzah, et, al. (2008), *Respon Komunitas Nelayan Terhadap Modernisasi Perikanan (Studi Kasus Nelayan Suku Bajo di Desa Lagasa, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara dalam Sodaliti Jurnal Sosiologi Pedesaan, Bogor: IPB*
- Hannerz, U, (1992), *Cultural Complexity*, New York: Columbia University Press.
- Humaedi, M.A. dan Sholihin, L. (ed), (2015), *Kaum Muda dan Budaya Maritim Nusantara; Bunga Rampai Lomba Esai Sosial Budaya Nasional 2015*, Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian

- Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Ifada Press.
- Kaunang, I.R., (1999). "Bulan Sabit di Nusa Utara. Islam di Kepulauan Sangihe dan Talaud pada Abad 16 dan 17", *Tesis*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM
- Kaunang, I.R., (2013), *Bulan Sabit di Nusa Utara: Perjumpaan Islam dan Agama Suku di Kepulauan Sangihe dan Talaud*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Koentjaraningrat, (2009), *Pengantar Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Kusumastanto, T. (2002). "Reposisi Ocean Policy dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah". *Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Kebijakan Ekonomi Perikanan dan Kelautan*. Bogor: FPIK- IPB
- Laksono, P.M. (ed). (2015). *Antropologi Pendidikan, Aneh: Biasanya tidak apa-apa*, Yogyakarta: Kepel Press
- Lapian, A.B. (2008), *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*, Jakarta: Komunitas Bambu
- Lapian, A.B. (2009), *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*, Jakarta: Komunitas Bambu
- Lawang, R. M.Z. (2014), "Beberapa Hipotesis Tentang Eksklusi Sosial di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol. 1, No.2
- Levitas, R. (2006), 'The concept and measurement of social exclusion' in Pantazis, C., Gordon, D. and Levitas, R. *Poverty and Social Exclusion in Britain*, Bristol, Policy Press.
- Lombard, D. (2008), *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu Bagian II: Jaringan Asia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Macpal, S. (2013), *Pewarisan Islam pada Masyarakat Minoritas; Sebuah Kajian Pendidikan Islam di Kendahe II, Kecamatan Kendahe*, [skripsi], Manado: STAIN Manado
- Novianto. (2014), *Krisis Kapitalisme dan Upaya Perebutan Ruang Hidup Rakyat di Pegunungan Kendeng Utara Pati-Jawa Tengah*, *Harian Indoprogres.com*
- Prins Wil J.M and Peter J.M.N, (1983), *The Struggle for The Third World City* dalam G. Ansari and P.J.M Nas (ed.), *Town-Talk: The Dynamics of Urban Anthropology*, Leiden: Brill
- Rosana, E, (2011), "Modernisasi dan Perubahan Sosial", *Jurnal TAPIS*, Vol. 7, No. 12
- Suhartini, A Halim, I Hambali dan A Basyid (Eds), (2005). *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: LKiS
- Roem, T. (ed) (2004), *Orang-Orang Kalah*, Yogyakarta: INSIST Press
- Tornquist, O., (2011), *Penghancuran PKI*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ulaen, A.J. (2003), *Nusa Utara dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Velasco, D, (2010), "Navigating the Indonesian-Philippine Border: The Challenges of Life in the Borderzone", *Kasarinlan, Philippine Journal of third world study*, Vol. 25, No. 1-2
- Yunita, D., dan Sekarningrum, B, (2018), "Eksklusi Sosial pada Masyarakat Petani", *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, No. 2, h. 25-37
- <http://sangihekab.go.id/home/index.php?mid=LambangDaerah>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020, pukul 15:23 wib
- <https://s2ppuns12.wordpress.com/2012/01/03/modernisasi-perikanan-terhadap-stratifikasi-masyarakat-pesisir-suku-bajo/> diakses pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 10.15
- <http://health.kompas.com/read/2011/11/01/02074380/modernisasi.nelayan> diakses pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 10.30
- <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/22/092782246/sangihe-sitaro-talaud-masuk-5-besar-termiskin-di-sulut>, diakses pada hari Jumat 26 Mei 2020, pukul 14.00 WIB